

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)**

Putri Melia¹. Vita Fitria Sari²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: putrimelia2626@gmail.com

Abstract: *This study aims to see the effect of public accountability, the clarity of budget targets and budget participation on the performance of managerial unit of local Solok regency of the Southern Regency. The population in this study is the whole SKPD Southern Southern District of 28 SKPD with 82 respondents. The sample in this study uses total technique sampling. Methods of analysis used are multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that public accountability and clarity of budget targets affect the performance of managerial unit of local Solok Regency of the Southern District. While the budget participation has no effect on the managerial performance of the Unit of Southern Southern District Unit.*

Keywords: *Manajeral performance; public accountability; clarity of budget goals budget Partisipation*

How to cite (APA 6th style)

Melia, P., & Sari, V.F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri B, 1068-1079.

PENDAHULUAN

Pergeseran penyelenggaraan sistem pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah bersamaan dengan reformasi keuangan dalam sistem penganggaran dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2003 yang mengharuskan penetapan sistem anggaran berbasis kinerja dimana fokus anggarannya berorientasi pada pencapaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis. Kesuksesan suatu organisasi tidak terlepas dari peran pemimpin dalam memotivasi bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya (Pasalong, 2010). Hal ini dikarenakan pimpinan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah satu kunci keberhasilan SKPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena kinerja yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik. Penilaian terhadap kinerja manajerial SKPD menjadi hal yang sangat penting karena penilaian kinerja manajerial akan membantu mengoptimalkan organisasi sektor publik terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi sektor publik (Amertadewi, 2013). Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial salah satunya adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi (Darmawan, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah kejelasan sasaran anggaran. Kenis (1979) mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran. Tujuan dan sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja (Andreson, 2015). Kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik memudahkan pemerintah menyusun rencana kerja dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga termasuk salah satu yang mempengaruhi kinerja manajerial. Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing-masing. Dengan adanya keterlibatan tersebut individu akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran sebaik mungkin sehingga akan meningkatkan kinerja (Laksmi, 2018).

Fenomena di lapangan terkait dengan kinerja adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Solok Selatan yang masih tergolong rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 346 dari 397 kabupaten di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat provinsi Sumatra Barat pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan berada di nomor urut 19 dibawah kabupaten Mentawai dengan urutan 18. Hasil tersebut mencerminkan bahwa pemerintah kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah paling buruk dari seluruh kabupaten kota di provinsi Sumatra Barat (www.antaranews.com). Kinerja pemerintah kabupaten Solok Selatan dilihat dari serapan anggaran pada bulan Mei 2017 baru mencapai 17,78% sedangkan pada akhir tahun serapan anggaran sudah mencapai 94,16% (www.hariansinggalang.co.id). Angka tersebut mencerminkan penumpukan anggaran di akhir tahun yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut peneliti merasa penelitian ini penting diteliti di kabupaten Solok Selatan berhubung kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten Solok Selatan bisa dikatakan paling buruk diantara kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatra

Barat tertinggal jauh dari kabupaten Dhamasraya yang sama-sama berdiri dengan kabupaten solok selatan. Tidak hanya itu kualitas laporan keuangan yang masih mendapatkan nilai C+ juga menjadi masalah pemerintah kabupaten Solok Selatan (www.solselkab.com).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan informasi dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengevaluasi sistem pengelolaan pemerintah daerah baik dari segi akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran untuk meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)

Teori penetapan tujuan dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Dia menemukan tujuan yang spesifik dan sulit menyebabkan kinerja yang baik dan tujuan yang mudah dicapai. Menurut Locke dan Lathan (2006) untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya. Organisasi memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan tujuan cenderung kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh atasan saja.

Goal Setting Theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar *Goal Setting Theory* adalah seseorang yang memahami tujuan atau sasaran akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Implikasi teori ini dalam penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai kinerja manajerial yang optimal, harus ada kesesuaian antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Individu yang memahami tujuan (sasaran) anggaran yang jelas dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki prestasi kerja (kinerja) lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak mengetahui tujuan (sasaran) anggaran secara jelas serta tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Kinerja

Mangkunegara (2000) mengungkapkan kinerja berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja yang dicapai oleh individu) yaitu hasil kerja serta kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau kelompok telah memiliki standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tidak ada tujuan dan target yang ditetapkan di awal maka kinerja tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya (Moehariono, 2012).

Kinerja Manajerial

Harefa (2008) mengungkapkan kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional organisasi. Pada umumnya, kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan kinerja manajerial bersifat abstrak atau kompleks. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pejabat struktural yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Kinerja manajerial dalam penelitian menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Mahoney *et,al* (1963) yang diukur delapan dimensi yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi pengawasan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2000). Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini diukur dengan dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Elwood (1993) dalam Mahmudi (2013) yang diturunkan menjadi indikator yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum dan kejujuran dan akuntabilitas keuangan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang dimana menunjukkan tujuan anggaran yang ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu penentu dalam pencapaian kinerja manajerial. Seorang pemimpin atau manajer harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Pegawai yang tidak mengetahui tujuan pekerjaan yang hendak dicapai maka akan membuat tujuan tercapai kurang efisien dan kurang efektif (Pasalong, 2010). Dalam penelitian ini pengukuran sasaran anggaran yang efektif ada pada tujuh indikator yaitu tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran, tingkat kesulitan dan koordinasi.

Partisipasi Anggaran

Kenis (1979) mengungkapkan partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manager atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing-masing. Hasen dan Mowen (2013) mengungkapkan partisipasi anggaran memberikan manfaat dalam mendorong kreativitas dan meningkatkan tanggungjawab. Keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan bermanfaat pada keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan organisasi yang lebih baik. Partisipasi anggaran dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikemukakan oleh milani (1975) yang terdiri dari enam indikator.

Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksana anggaran (Sadjiarto, 2000). Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin tinggi pula kinerja mencapai tujuan organisasi. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan pengaruh positif antara variabel akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial (Darmawan, 2017; Efriza, 2017; Putra, 2013).

H1: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial kerja perangkat daerah.

Kejelasan sasaran anggaran akan membuat pegawai atau manajer bekerja lebih giat. Hal ini sesuai dengan *goal setting theory* yang menyatakan bahwa tujuan spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang kurang jelas dan mudah (Locke, 1960). Tujuan yang jelas dan sulit dalam suatu organisasi dapat membuat pegawai atau manajer bekerja lebih giat dalam mencapai sasaran sehingga kinerja yang dihasilkannya lebih tinggi dari pada tidak ada tujuan atau keharusan yang harus mereka capai. Hal ini didukung oleh beberapa peneliti yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial (Efrizar, 2017; Candrakusuma, 2017; Nadirsyah, 2012; Andreson, 2018).

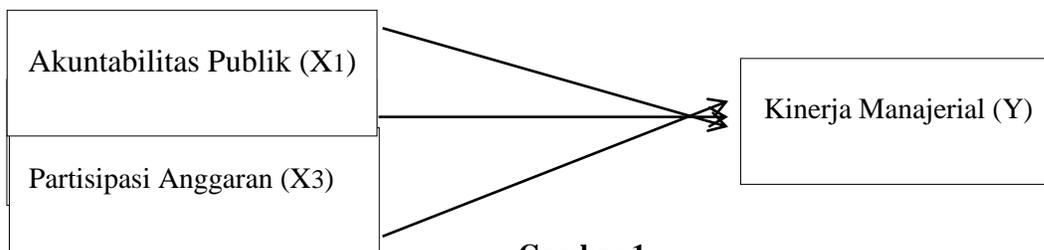
H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial kerja perangkat daerah.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran membuat pegawai lebih cenderung bekerja lebih giat. Pernyataan tersebut sesuai dengan *goal setting theory* yang menjelaskan individu akan lebih berkomitmen dan giat bekerja dalam melaksanakan tujuannya ketika individu menetapkan tujuannya sendiri dibandingkan tujuan yang telah ditetapkan atasan (Locke, 2006). Manajer yang ikut terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran akan membentuk sikap dan sifat positif karena merasa dihargai dan akan meningkatkan kinerjanya karena merasa bertanggungjawab dalam proses penyusunan anggaran dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan pengaruh positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial (Rozak, 2016; Amartadewi, 2013; Hayat, 2016; Oyewe, 2018).

H3: Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial kerja perangkat daerah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian yang berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugioyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjumlah 28 SKPD. Sampel penelitian ini yaitu Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Jumlah responden sebanyak 84 responden dari 28 SKPD.

Alasan pemilihan sampel tersebut adalah pegawai yang menjabat posisi tersebut ikut serta dalam menyusun, melaporkan anggaran dan terlibat proses pelaksanaan anggaran dan menjabat sebagai pimpinan atau manajer setiap kegiatan. Variabel dependen dalam penelitian diukur dengan 8 indikator yang dikemukakan oleh Mahoney *et,al* (1963). Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas publik diukur dengan 5 indikator yang diungkapkan Mahmudi (2013), variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan 7 indikator yang dikemukakan oleh Locke dan Latham (1984) dan variabel partisipasi anggaran diukur dengan 6 indikator yang diungkapkan Milani (1975).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Normalitas

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	2.26113049
	Absolute	.082
Most Extreme Differences	Positive	.069
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.745
Asymp. Sig. (2-tailed)		.636

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019

Dari pengolahan data SPSS didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *Kolmogrov Smirnov Z* sebesar 0,745 dengan signifikan 0,636. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti, karena nilai signifikansi dari jumlah normalitas > 0,05.

Uji Multikoloniersitas

Tabel 2
Uji Multikoloniersitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.518	2.336		.650	.518		
1 X1	.586	.107	.617	5.479	.000	.315	3.174
X2	.289	.140	.227	2.072	.042	.332	3.013
X3	.041	.139	.027	.296	.768	.492	2.032

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, pada tabel diatas dapat dilihat variabel akuntabilitas publik (X1) dengan nilai VIF 3,174 dan *tolerance* 0,315, variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) dengan nilai VIF 3,013 dan *tolerance* 0,332 dan variabel partisipasi anggaran (X3) dengan nilai VIF 2,032 dan *tolerance* 0,492 dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 3
Uji Heterokedasitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.456	1.431		-.318	.751
X1	-.050	.065	-.150	-.759	.450
X2	.081	.086	.182	.947	.347
X3	.081	.085	.151	.955	.343

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing masing variabel menunjukkan bahwa level sig > α 0,05. nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas publik (X1) 0,450 > 0,05, nilai signifikansi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) 0,347 > 0,05, dan nilai signifikansi untuk variabel partisipasi anggaran (X3) 0,343 > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.518	2.336		.650	.518
Akuntabilitas Publik	.586	.107	.617	5.479	.000
Kejelasan Sasaran Anggaran	.289	.140	.227	2.072	.042
Partisipasi Anggaran	.041	.139	.027	.296	.768

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4di atas dapat dianalisis model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,518 + 0,586 X1 + 0,289 X2 + 0,041 X3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Manajerial

X1 = Akuntabilitas Publik

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X3 = Partisipasi Anggaran

Uji Hipotesis

Uji F(Uji Simultan)

Berdasarkan perhitungan SPSS dapat didapatkan nilai F Hitung > F Tabel yaitu $57,455 > 3,96$ dan nilai Signifikasi $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara variabel-variabel bebas dengan variabel-variabel terikat.

Uji T (Parsial)

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan perhitungan SPSS variabel akuntabilitas publik (X1) memiliki nilai thitung sebesar 5,479 dan nilai sig. adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel yaitu $5,479 > 1,656$ atau nilai signifikasi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwahipotesis pertama (H1) **diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan perhitungan SPSS variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,072 dan nilai sig. adalah 0,042. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel yaitu $2,072 > 1,656$ atau nilai signifikasi $0,042 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwahipotesis kedua (H2) **diterima**.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan perhitungan SPSS variabel partisipasi anggaran (X3) nilai t hitung adalah 0,296 dan nilai sig. adalah 0,768, dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung < t tabel yaitu $0,296 < 1,664$ atau nilai signifikasi $0,768 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwahipotesis ketiga (H3) **ditolak**.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan perhitungan SPSS model summary besarnya Adjusted R Square adalah 0,676. Hal ini menjelaskan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 67,6% sedangkan 32,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan koefisien β bernilai positif yaitu 0,586 dengan tingkat capaian responden kategori baik dengan angka 74,15%. Hal ini menunjukkan akuntabilitas publik memiliki indikator yang dominan yaitu dengan adanya akuntabilitas publik berarti pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakannya kepada masyarakat atas dana-

dana yang berasal dari masyarakat tersebut sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2017), Efrizar (2017) dan Putra (2013) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis dua (H2) diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ dan koefisien β bernilai positif yaitu $0,289$ dengan tingkat capaian responden kategori baik dengan angka $73,17\%$. Hal ini menunjukkan Manajer tingkat menengah SKPD dalam melakukan tugasnya di pemerintah sudah mengetahui dengan jelas sasaran dan tujuan yang harus dicapai dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan.

Temuan penelitian ini mendukung konsep kejelasan sasaran anggaran pada *Goal Setting Theory* yaitu dimana seseorang yang memahami tujuan dan sasaran yang jelas akan berpengaruh pada perilaku kerjanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andreson (2015), Putra (2013), Efrizar (2017), Candrakusuma (2017) dan Nadirsyah (2012). Namun, hasil berbeda ditemukan Ufairah (2016) yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis Ketiga (H3) ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi $0,768 > 0,05$ dan koefisien β bernilai positif $0,041$. dengan tingkat capaian responden kategori baik dengan angka $73,70\%$. Berdasarkan data tersebut mencerminkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran bisa dikatakan baik namun belum optimal sehingga tingkat capaian responden yang baik ini tidak dapat membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori *goal setting theory* menyatakan untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya dengan cara ikut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian Oyewo (2018). Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi (2018) dan Candrakusuma (2017) yang menemukan tidak terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas publik dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten Solok Selatan.
- b. Kejelasan sasaran anggaran dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten Solok Selatan.

- c. Sedangkan partisipasi anggaran dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten Solok Selatan.

Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data hanya melalui kuesioner sehingga masih ada kemungkinan beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban responden yang tidak cermat serta pertanyaan yang kurang dipahami responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Dalam penelitian ini hanya menggunakan Satuan Kerja Perangkat daerah Solok selatan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat di generalisasi ke kota atau kabupaten lain di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Solok Selatan diharapkan untuk melakukan evaluasi bagi pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan jabatan yang dipegangnya saat ini.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperoleh data melalui sumber lain seperti wawancara dari beberapa responden, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menghindari pengisian kuesioner yang kurang tepat.
- c. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lain seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan kepuasan kerja serta memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amertadewi, Tjoko Istri Mas dan Dwirandra A.A.N.B. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Locus Control Sebagai Moderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Andreson, D.M. Justin M.S. 2015. Goal Clarity, Task Significance, and Performance: Evidence From a Laboratory Experiment. *Jurnal of Public Administration Research and Theory*.
- Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Anthony dan Govindarajan. 2006. *Management Control System Edisi Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ateman, T. S. dan Bruce, B. 2012. Master of the Long haul: Pursuing Long-term Work Goals. *Journal of Organizational Behavior*.
- Candrakusuma, DesyAmalia, dan Bambang Jamitko. 2017. Dampak Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.

- Darmawan, Rizky. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM FEKON*
- Efrizar, Rona. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial. *JOM FEKON*.
- Garrison et, al. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harefa, K. 2008. *Analisis Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komunikasi Sebagai Variable Moderating Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Di Medan*. Tesis Tidak Diterbitkan. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hasen dan Mowen. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Husni, yuanelarosa .2017 .*Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kepuasan Kerja Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Kota Medan*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Hayat, Atma dan ArsonoLaksmana. 2016. Influence Of Decentralization, Participation, Distributive Justice, Procedural Justice In Budgeting To Organizational Commitment And Performance Of Public Sector Managers. *European Journal of Business and Management*
<https://www.solselkab.go.id/post/read/2035/raih-opini-wtp-lembaran-baru-solok-selatan.html>
<https://www.solselkab.go.id/post/read/2336/ini-opd-solok-selatan-yang-serapan-anggaran-terendah.html>
<https://sumbar.antaranews.com/berita/211811/ini-opd-solok-selatan-yang-serapan-anggaran-terendah>
- Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes, and Performance. *Journal Accounting Review*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional. (www.otda.kemendagri.go.id)
- Laksmi, Ayu Chairina dan PrasetyoNugroho.2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XXI*.
- Locke, E. A. dan Latham, G. P. 2006. New Directions in Goal-Setting Theory. *Journal Association for Psychological Science*.
- Locke, E. A. dan Latham . 1984. Goal Setting A Motivational Technique That Works. Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey.
- Mahoney, et al. 1963. Development of Managerial Performance. A Research Approach Cincinnati. *South Western Publishing*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mangkunegara, A. P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. *The Accounting Review*.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers

- Mohennoko, Anandika A. dan Agustinus S.A. 2011. *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munandar, M. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nadirsyah, M.Rizal Yahya, dan Gunawan Putra. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Natalia. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro
- Oyewo, B. Gbadagesin A. 2018. *Budgetary Participation and Managerial Performance In Public Sector Organizations Nigeria*. Annals of SpiruHaret University
- Pasalong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Putra, Dekki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*. Skripsi tidak diterbitkan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Rivai, V dan Basri A. F. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rozak, Dede Abdul. 2016. Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyono. 2004. Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajer Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Suwarni, Desi Endang. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 2000. *Good Government (Paradigma baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jarkata*.
- _____ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta*.
- Ufairah, Afifah Nur dan H. SyamsurijalTan.Z. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Universitas Jambi*.